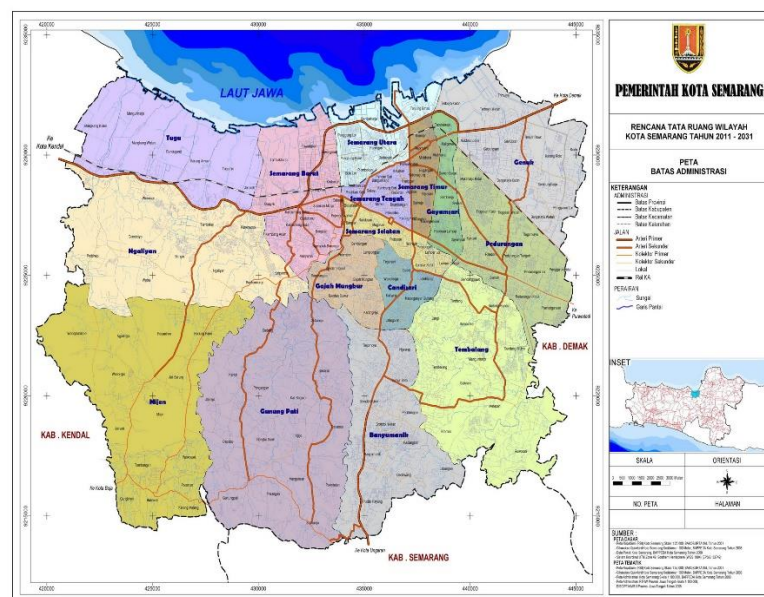


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang adalah salah satu kota besar dan kota industri di Indonesia sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal dibagian barat, bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, bagian Timur dengan Demak dan Laut Jawa di bagian Utara.

Gambar 2 1Batas Wilayah Kota Semarang



Sumber: Jatengprov.go.id

Kota Semarang secara administrasi terbagi dari 16 Kecamatan dengan jumlah total 177 Kelurahan. Total keseluruhan luas wilayah kota Semarang 373,70 Km yang terdiri dari 39,56 tanah sawah atau sebesar 10,59% dan sisanya 334,1 atau sebesar 89,41% bukan lahan persawahan.

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Mijen	14
2	Gunungpati	16
3	Banyumanik	11
4	Gajah Mungkur	8
5	Semarang Selatan	10
6	Candisari	7
7	Tembalang	12
8	Pedurungan	12
9	Genuk	13
10	Gayamsari	7
11	Semarang Timur	10
12	Semarang Utara	9
13	Semarang Tengah	15
14	Semarang Barat	16
15	Tugu	7
16	Ngaliyan	10

Sumber: Jatengprov.go.id

Kota Semarang pada bulan Juni tahun 2020 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki total penduduk berjumlah 1.680,417 Jiwa yang jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin berjumlah 831,757 Jiwa berkelamin Laki Laki dan 848,660 berjenis kelamin Perempuan, berikut adalah rincian per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan di Kota Semarang.

Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Total
Semarang Tengah	29,174	31,594	60,768
Semarang Barat	77,624	79,957	157,581
Semarang Utara	61,647	63,407	125,054
Semarang Timur	35,307	37,346	72,653
Gayamsari	36,579	37,094	73,637
Gajah Mungkur	29,138	30,066	59,204
Genuk	59,202	58,890	118,092
Pedurungan	96,404	97,882	194,286
Candisari	39,326	40,575	79,901
Banyumanik	69,892	71,431	141,323
Tembalang	47,952	47,900	95,852
Tugu	17,120	17,010	34,130
Ngaliyan	69,976	70,578	140,554
Mijen	37,904	37.942	75,846

Semarang Selatan	33,310	35,090	68,400
Total	831,757	848,660	1,680,417

Sumber: dispendukcapil.semarangkota.go.id

Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Pedurungan dengan total 194,286 Jiwa dengan pembagian 96,404 Jiwa adalah laki laki dan 97,882 jiwa adalah perempuan, lalu diikuti oleh Semarang Barat dengan jumlah 157,581 jiwa dengan rincian 77,624 jiwa adalah laki laki dan 79,957 jiwa adalah perempuan. Lalu wilayah kecamatan Kota Semarang yang memiliki populasi penduduk yang rendah adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah populasi 34,130 Jiwa dengan rincian 17,120 laki laki dan 17,010 perempuan dan diikuti oleh Kecamatan Gajah Mungkur dengan rincian 29,138 laki laki dan 30,066 perempuan.

Dari banyaknya jumlah penduduk yang ada dikota Semarang tentu menjadi pertanyaan tersendiri yaitu bagaimana pemenuhan lapangan pekerjaan di Kota Semarang. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang dirilis pada tahun 2019 total Angkatan kerja Kota Semarang berjumlah 951,135 jiwa dengan rincian 907,937 bekerja dan 43,938 sebagai pengangguran terbuka atau sebesar 4,5%. Namun menariknya justru dalam tiga tahun terakhir yaitu kurun waktu 2017-2019 jumlah pengangguran terbuka di Kota Semarang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka sebesar 63.700 dengan total angkatan kerja sebesar 963,496, tahun 2018 jumlah pengangguran terbuka sebesar 48,724 dengan total angkatan kerja sebesar 921,551 dan pada

tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka di Kota Semarang sebesar 43.198 dengan total angkatan kerja sebesar 951.135. Adapun jika dipersentasikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Persentase Pengangguran Terbuka Kota Semarang

2017	2018	2019
6,61	5,29	4,54

Sumber: BPS Kota Semarang

2.2 Kondisi Tenaga Kerja di Kota Semarang Selama Pandemi

Selama pandemi corona berlangsung di Indonesia khususnya di Kota Semarang ternyata juga memberikan dampak kepada sektor tenaga kerja di Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang per tanggal 5 Oktober 2020 setidaknya ada 90 perusahaan yang dikota Semarang yang melakukan PHK maupun merumahkan tenaga kerjanya. Dari 90 perusahaan tersebut sebanyak 5996 dirumahkan dan 5090 terkena PHK dengan total tenaga kerja yang terdampak sebanyak 11.806 tenaga kerja.

Tabel 2.4 Data Perusahaan Terdampak Covid

No.	Nama Perusahaan	Jumlah PHK	Jumlah Dirumahkan
1	Hotel Neo Candi Simpang Lima		35
2	Patra Semarang Hotel		53
3	Allstay Hotel	7	11
4	Candiview Hotel		26
5	CV Aleska Makmur	1	
6	CV Anugrah Jaya		77
7	CV Aneka Ilmu		7
8	CV Krisna Sakti	4	
9	Fave Hotel Diponegoro		23

10	Game Fantasia Java Mall		15
11	Game Fantasia Mall Ciputra		22
12	Graha Satu Tiga Tujuh		55
13	Harris Hotel Sentraland		74
14	Holiday Inn Express Semarang		59
15	Hotel Aston Inn		76
16	Hotel Dalu Majapahit		20
17	Hotel Santika Premiere		91
18	Hotel Siliwangi		40
19	Klinik Utama Centrum		19
20	PT Efhar		16
21	PT Cikal Dian Astuti		1
22	PT Dewi Pengayom Bangsa	4	
23	PT Dragon Prima Farma		92
24	PT Dunkindo Lestari		30
25	PT Fast Manufacturing	77	
26	PT Graha Masindo Pratama		61
27	PT Graha Mitra Balindo		14
28	PT Ikatan Cermat		19
29	PT Jay Kay Filles Indonesia	368	
30	PT Korina Semarang		1146
31	PT Kurnia Adijaya Mandiri		99
32	PT Majati Furniture	49	50
33	PT Marie Albert Indonesia	35	
34	PT Molly Sentosa Indonesia		277
35	Horisson Inn Alaska Hotel		35
36	PT Tegar Sukses Abadi		8
37	PT Tri Cahya Purnama		67
38	PT Adiarta Boga		18
39	PT Alia Duta Pertiwi		9
40	PT Batraja Makmur Wiretama		59
41	PT Bukit Mayak Asri		4
42	PT Centra Park Citra	50	
43	PT Deta Sukses Makmur	159	
44	PT Dewangga Travindo	1	
45	PT Eude Indonesia	70	
46	PT Golden Manyaran		154
47	PT Griya Sumber Sejati		17
48	PT John Glove Factory	45	
49	PT Makabana Indonesia Group		8
50	PT Mod Indo Semarang	147	1048

51	PT Pahala Agung		29
52	PT Pentasari Prankarya	40	5
53	PT Plasa Simpang Lima		124
54	PT Produktif Citrasukses	32	
55	PT Country Form Furniture	422	
56	PT Randugarut Plastic Indonesia	451	
57	PT Richtex Garmino	104	
58	PT S2DIO Industries	48	
59	PT Sai Garment Industri	541	
60	PT Sakapatat Masamar Sosial		56
61	PT Sakti Purwa Mukti	24	
62	PT Sumber Samudra Indonesia	4	
63	PT Sunindo Indah Hotel		14
64	PT Idola Aerindo Udaya		36
65	PT Yang Ming Internasional		80
66	PT Amazon Karya Elok Daya	34	
67	Hotel Noormans		43
68	RS Banyumanik	43	
69	PT Griya Sumber Sejati		17
70	PT Pantia Tunggal Kinting Mill	923	
71	CV Mitra Boga Pratama		156
72	CV Tavernindo		50
73	PT Bao Long Indonesia	48	63
74	PT Lukie Works Indonesia	84	135
75	PT Mas Siluta	19	283
76	PT Mas Sumbiri	618	
77	PT WKC		5
78	PT Palliser Indonesia	11	
79	PT Riasarana Putrajaya	292	
80	Hotel Novotel	35	
81	Hotel Ibis Budget	8	
82	PT Grand Best Indonesia	306	
83	PT Jinlin Luggage Indonesia	858	
84	PT KIN YP	2	
85	PT Sapta Patra Utama	1	
86	PT GS Battery	6	
87	PT Semar Pelita Jaya	14	
88	PT Kece Transport Semarang	9	
89	PT Chub General Insurance	2	
90	PT Dewi Putri Nasima		59
	Jumlah	5996	5090

		Total	11086
--	--	-------	-------

Sumber: Dinasker Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah memberikan bantuan berupa sembako namun dari total 11.086 tenaga kerja terdampak hanya sebanyak 2.215 tenaga kerja yang mendapatkan bantuan. Terbatasnya jumlah penerima bantuan diakibatkannya minimnya perusahaan yang memberikan data tenaga kerjanya dan banyaknya tenaga kerja yang bukan ber KTP Semarang namun bekerja di Kota Semarang sehingga tidak berhak mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Semarang, berikut adalah data rincian penerima bantuan sembako bagi tenaga kerja terdampak per kecamatan.

Tabel 2.5 Data Penerima Bantuan Sosial Tenaga Kerja Terdampak

Nomor	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima
1	Banyumanik	63
2	Candisari	103
3	Gajah Mungkur	47
4	Gayamsari	111
5	Genuk	216
6	Mijen	90
7	Gunungpati	353
8	Pedurungan	135
9	Semarang Barat	185
10	Semarang Selatan	56
11	Semarang Tengah	51
12	Semarang Timur	125
13	Semarang Utara	382
14	Tembalang	111
15	Tugu	187
	Jumlah	2215

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

2.3 Peran Serikat Pekerja

Secara umum peran serikat pekerja adalah menyerap aspirasi dan mengadvokasikan kepentingan para anggota serikat pekerja mengenai hak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pekerja dan pemberi kerja. Dalam persoalan pengupahan, serikat pekerja turut adil dalam proses dewan pengupahan yang didalamnya terdapat berbagai unsur yaitu perwakilan serikat pekerja, apindo dan pemerintah. Serikat pekerja terus memastikan bahwa penetapan upah minimum telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui peraturan mekanisme undang undang dengan harapan besaran upah dapat mensejahterakan para pekerja.

KSPN sendiri sebagai serikat pekerja terbesar di Kota Semarang juga turut andil dalam dewan pengupahan, setidaknya KSPN memiliki dua perwakilan dari total 5 perwakilan serikat buruh di dewan pengupahan dan dua wakil di Lembaga Kerja Sama Tripartit dari total 4 kursi yang diisi oleh serikat pekerja. Lebih banyaknya perwakilan yang dimiliki oleh KSPN hal ini ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah anggota yang terdaftar secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Selain FKSPN, terdapat tiga serikat buruh yang tergabung dalam dewan pengupahan yaitu KSPI atau dikenal dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI memiliki satu perwakilan di anggota dewan pengupahan Kota Semarang, selanjutnya ada SPSI yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI memiliki satu perwakilan di anggota dewan pengupahan Kota Semarang dan yang terakhir ada

FSPI yaitu Federasi Serikat Pekerja Industri, FSPI memiliki satu perwakilan di anggota dewan pengupahan Kota Semarang.

2.4 Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN)

KSPN merupakan organisasi buruh ataupun organisasi serikat pekerja dalam bentuk Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau disebut dengan FKSPN. FKSPN adalah gabungan dari serikat pekerja yang ada di perusahaan baik dibidang industri, perdagangan dan jasa, baik secara formal dan informal. FKSPN terafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang merupakan gabungan dari Serikat Buruh di Indonesia ataupun Federasi Serikat Buruh/Pekerja.

Berdasarkan data yang ada di Disnaker Kota Semarang jumlah keanggotaan yang tercatat sebagai anggota Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang berjumlah 24.104 anggota yang terdiri dari 38 unit kerja (PUK). Adapun ditingkat Provinsi Jawa Tengah KSPN memiliki kader 65.395 orang yang tergabung melalui 96 unit Kerja (PUK).

2.4.1 Visi KSPN

KSPN memiliki visi sebagai generasi pembaharu dalam gerakan serikat pekerja di Indonesia yang berdasarkan kemandirian, bermartabat serta memiliki jiwa yang professional dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anggota serikat pekerja yang memiliki landasan keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik maupun keyakinan.

2.4.2 Misi KSPN

1. Membangun kesadaran dalam berserikat serta melakukan pengembangan KSPN secara nasional.
2. Mengumpulkan solidaritas pekerja dalam mewujudkan gerakan pekerja di Indonesia.
3. Berupaya meninggikan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mencerdaskan kehidupan pekerja baik secara kualitas dan kuantitas.
4. Mewujudkan karakter pekerja agar memiliki jiwa juang serta bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas.
5. Menciptakan kader yang memiliki keberanian, kemauan, dan kemampuan yang baik dalam mengelola organisasi.
6. Melakukan penataan pengelolaan organisasi secara akuntabel serta memprioritaskan pelayanan kepada anggota serikat.
7. Mewujudkan perlindungan kepada anggota serikat dalam hubungan industrial, dan berupaya mewujudkan kondisi kerja yang baik, syarat kerja, kesehatan kerja dan yang terakhir adalah keselamatan kerja bagi pekerja.
8. Berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serikat pekerja dan keluarganya agar hidup lebih sejahtera.
9. Membangun sikap kritis anggota kepada regulasi yang merugikan hak para pekerja.
10. Mewujudkan tingkat kesejahteraan anggota dengan cara kegiatan ekonomi seperti koperasi dan usaha ekonomi yang berbentuk yayasan.

11. Memberikan informasi kepada para anggota serikat pekerja mengenai permasalahan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota serikat pekerja.
12. Membangun solidaritas dan kerja sama nasional dan internasional untuk mewujudkan gerakan serikat pekerja yang kuat tanpa mengurangi kebebasan dan kemandirian organisasi.

Dari visi dan misi Konfederasi Serikat Pekerja Nasional dapat disimpulkan bahwa organisasi serikat pekerja KSPN berupaya memperjuangkan kepentingan serikat pekerja agar pekerja memiliki tingkat kesejahteraan dan keadilan yang baik, upaya KSPN dengan cara membangun solidaritas antar pekerja dan tentunya juga beorientasi untuk meningkatkan kualitas dari pekerja itu sendiri.

2.4.3 Struktur Organisasi KSPN Kota Semarang

1. Ketua : Heru Budi Utoyo, SH.
2. Wakil Ketua : Anang Prawoto
3. Wakil Ketua : Anik Ariyani
4. Wakil Ketua : Slamet Kaswanto, SH, MH.
5. Wakil Ketua : Yartatik
6. Wakil Ketua : Alwi Koesmarwoto, AMd
7. Sekretaris : Kholilul Wasik
8. Wakil Sekretaris : Murtatik

9. Bendahara : Mahrozi

2.5 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah organisasi pekerja yang berhimpun dari berbagai latar belakang pekerja diseluruh Indonesia. SPSI adalah salah satu diantara serikat pekerja yang diakui oleh pemerintah, pemerintah Indonesia telah mengakui SPSI sejak kongres kedua SPSI yaitu pada tanggal 26-30 November 1985. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI pada awalnya memiliki nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI saat ini telah memiliki anggota lebih dari satu juta yang tersebar diseluruh Indonesia. Di Kota Semarang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memiliki anggota yang terverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebanyak 11.396 dan memiliki 1 perwakilan di Dewan Pengupahan Kota Semarang.

2.5.1 Visi SPSI

Visi dari SPSI adalah mewujudkan organisasi pekerja yang berjuang untuk menciptakan kesejahteraan secara lahir maupun batin bagi para anggota pekerja dan keluarganya dengan cara mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan memiliki nilai keadilan dalam kehidupan bernegara yang berdemokrasi, serta berdaulat didalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

2.5.2 Misi SPSI

1. Serikat pekerja yang membangun dan memberdayakan kekuatan serikat pekerja/serikat buruh.

2. Menciptakan pekerja yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan solidaritas sosial, cerdas, memiliki jiwa tangguh, disiplin tinggi serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.
3. Mewujudkan organisasi yang modern serta memiliki budaya organisasi yang maju..
4. Menciptakan hubungan kondisi industrial yang adil dan makmur serta melahirkan kesejahteraan lahir batin dan memperjuangkan peraturan dibidang tenaga kerja serta menghormati hak hak pekerja dalam berserikat.
5. Menciptakan tata kelola tenaga kerja yang baik serta bersih, melindungi bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Menciptakan pekerja nasional yang bermatabat serta menjalankan keadilan sosial dan dihormati dalam hubungan internasional. .

2.5.3 Struktur SPSI Kota Semarang

1. Peni Dwi A
2. stuti = Ketua
3. Hartoyo = Wakil Ketua
4. H. Zaenuri = Wakil Ketua
5. Sunaryo = Wakil Ketua
6. Andreas L Margono = Wakil Ketua
7. HM Nasroh = Wakil Ketua
8. Suwardi SH = Wakil Ketua
9. Krismanto = Wakil Ketua

10. Cahyo Adhi Widodo = Sekretaris
11. Agustina = Wakil Sekretaris
12. Sugiyarto = Wakil Sekretaris
13. Nono S = Wakil Sekretaris
14. Budi Raharjo = Bendahara
15. Sri Rahayuningsi = Wakil Bendahara
16. Baron = Wakil Bendahara

2.5.4 Tugas dan Fungsi SPSI

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana penyaluran aspirasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan para pekerja.
2. Sebagai perwakilan pekerja dalam perundingan industrial.
3. Berupaya dalam melindungi dan membela kepentingan para pekerja.
4. Sebagai sarana dalam melakukan pembinaan serta meningkatkan pengetahuan pekerja.
5. Sebagai keterwakilan pekerja dalam proses perjuangan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.
6. Sebagai perwakilan pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan.
7. Sebagai wakil anggota didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan.

8. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pembinaan terhadap anggota dalam rangka pembangunan baik secara professional, terampil dan produktif serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik.
9. Sebagai mitra yang kritis dan progresif dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dibidang tenaga kerja serta melakukan kontrol terhadap kebijakan mengenai tenaga kerja.

2.6 Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI)

Federasi Serikat Pekerja Independen adalah organisasi serikat pekerja lintas sektoral. Federasi Serikat Pekerja Independen berdiri sejak kongres pertama di laksanakan yaitu pada tanggal 7 November 2010. Organisasi pusat FSPI berkedudukan di Jl Abimanyu 1 Nomor 21 Kota Semarang.

FSPI memiliki fungsi sebagai sarana dan prasarana pembinaan terhadap pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal, pengerak anggota dalam rangka mensukseskan program nasional khususnya dibidang ekonomi, pendidikan, industrial, hukum dan sosial politik, sebagai pembela hak kepentingan anggota serta keluarganya dan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan para anggota serikat pekerja dan keluarganya.

2.6.1 Visi FSPI

1. Berperan dalam mewujudkan cita cita bangsa Indonesia serta menjalankan UUD 1945 .
2. Menyatukan para pekerja dan meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia beserta keluarganya.

3. Mewujudkan rasa persaudaraan yang tinggi antar kaum pekerja beserta keluarganya.
4. Meningkatkan produktivitas kerja, mengawal syarat syarat kerja dan kondisi kerja.
5. Mewujudkan hubungan industrial yang baik demi menciptakan ketenaga kerja dan ketenagan usaha yang baik.
6. Menciptakan hubungan industrial yang positif serta harmonis di tingkat bipatrit dan tripatrit.

2.6.2 Misi FSPI

1. Berpartisipasi secara aktif dan memiliki peran dalam upaya pembangunan nasional serta berupaya meningkatkan peran organisasi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.
2. Berjuang untuk terciptanya undang undang tenaga kerja, dan perjanjian kerja yang menjamin kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.
3. Berupaya untuk mewujudkan syarat kerja yang layak berdasarkan keadilan maupun tanggung jawab sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota dengan menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilan pekerja serta kemampuan dalam berorganisasi.
5. Mewujudkan usaha koperasi sesama anggota untuk melayani serta memenuhi kebutuhan sendiri serta usaha lain yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

2.6.3 Struktur Organisasi

1. Ketua : Waluyo
2. Sekretaris Jendal : Wahyu Ciptaningsih
3. Kepala Biro Pengembangan Ekonomi : Slamet Raharjo
- Wakil : Joni Trianto
4. Kepala Biro Advokasi : Slamet Widodo
5. Kepala Biro Pendidikan dan Latihan : Tri Retno Watik
6. Kepala Biro Pengembangan Organisasi : HR Sutarno
7. Kepala Biro Transportasi : Suroso

2.7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang adalah lembaga pemerintah dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tugas pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang adalah lembaga pemerintah dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tugas pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja juga berfokus pada membangun hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dan perusahaan yang ada di Kota Semarang. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang juga bertanggung jawab atas ketrampilan tenaga kerja sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sering mengadakan pelatihan pelatihan untuk tenaga kerja.

2.7.1 Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Terwujudnya Iklim Ketengakerjaan dan Ketransmigrasian yang kondusif serta berkualitas menuju masyarakat yang sejahtera.

2.7.2 Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

1. Berupaya meningkatkan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja.
2. Berupaya dalam meningkatkan kesempatan kerja serta penempatan transmigrasi.
3. Berupaya dalam meningkatkan hubungan industrial.
4. Berupaya secara maksimal melindungi tenaga kerja.
5. Berupaya secara maksimal dalam melakukan pelayanan kepada tenaga kerja dan masalah transmigrasi.

2.7.3 Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang memiliki tugas pokok menjalankan wewenang pemerintah kota di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

2.7.4 Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

1. Melakukan penyusunan kebijakan dan melakukan pengendalian di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Memiliki tugas dalam pemberian pelayanan secara umum serta perijinan masalah tenaga kerja.
3. Melaksanakan tugas pembinaan kepada calon pekerja, syarat kerja serta melakukan perlindungan kepada pekerja.
4. Melaksanakan pengawasan kepada pelaksanaan dilapangan mengenai peraturan di bidang tenaga kerja

5. Melakukan pembinaan kepada UPD.
6. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan Instansi.
7. Melakukan pelaksanaan fungsi serta tugas lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh walikota.

2.2.5 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelatihan.
 - a) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja.
 - b) Seksi Pengembangan dan Kebutuhan Pelatihan.
 - c) Seksi Sertifikasi Kompetensi Pelatihan.
4. Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja.
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - c) Seksi Pemberdayaan Purna Kerja.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

- a) Seksi Syarat-Syarat Kerja.
 - b) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.
 - c) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial.
6. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja.
- a) Seksi Informasi Pasar Kerja.
 - b) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - c) Seksi Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja
7. Unit Pelaksanan Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.8 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau sering dikenal dengan APINDO pada awal pendiriannya dinamakan sebagai Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia muncullah persoalan diberbagai aspek yang mulai menjadi perhatian salah satunya adalah masalah sosial ekonomi. Masalah seosial ekonomi ini juga lah yang mulai masuk ke dalam dunia usaha.

Berbagai permasalahan di dunia usaha mulai muncul, salah satu isunya adalah persoalan industrial dan ketengakerjaan. Tuntutan para tenaga kerja yang sebelumnya berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia kini berubah menjadi perjuangan mendapatkan hak dan perlindungan kerja yang baik, hal inilah yang

memicu persoalan hubungan industrial yang melibatkan dua aktor yaitu buruh atau pekerja dan para majikan.

Melihat kondisi dalam dunia usaha yaitu dengan meningkatnya persoalan ketengakerjaan dan hubungan industrial, para pengusaha ataupun majikan mempertimbangkan perlunya satu wadah berhimpun sebagai sarana untuk bertukar pikiran dalam rangka menyelesaikan permasalahan di bidang hubungan industrial dan ketengakerjaan. Dalam cakupan yang luas, forum tersebut diharapkan organisasi tersebut dapat menlurkan aspirasi para majikan ke pemerintah maupun organisasi lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri yang berhubungan dengan dunia industri dan ketenagakerjaan.

Pada awalnya, forum ini telah mengalami berbagai perubahan nama, hingga pada tanggal 31 Januari 1952, tergagas nama Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). Perubahan nama dari PUSPI menjadi APINDO baru disahkan ketika dilaksanakan kongres nasional ke II di Surabaya tahun 1985. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau dikenal APINDO adalah wadah organisasi untuk berjuang bagi para pelaku usaha atau pengusaha demi menciptakan hubungan industrial yang baik serta berkelanjutan.

2.8.1 Visi Apindo

Menjadikan apindo sebagai organisasi kesatuan dan persatuan yang dinamis serta Tangguh bagi para pelaku usaha di Indonesia demi mewujudkan adanya persamaan pendapat dalam melaksanakan kebijakan hubungan industrial khususnya

dalam bidang sumber daya manusia serta hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan kebijakan hubungan industrial Pancasila.

2.8.2 Misi Apindo

1. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama ditingkat perusahaan.
2. Meningkatkan peran dan mewakili dunia usaha di lembaga ketengakerjaan.
3. Mewujudkan peningkatan perlindungan dunia usaha.
4. Melakukan peningkatan pembinaan, pelayanan serta pembelaan terhadap anggota organisasi.
5. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan organisasi masyarakat lainnya.

Dari tugas dan visi Apindo dapat disimpulkan bahwa Apindo adalah organisasi yang memperjuangkan kepentingan para pengusaha dan memperjuangkan anggota organisasi dan meningkatkan perlindungan bagi para pengusaha yang tergabung dalam anggota organisasi.

2.8.3 Struktur Organisasi Apindo Kota Semarang

1. Dewan Penasehat

- Kukrit Wicaksono, M.B.A
- H. Amir
- Setiawan Santoso

- Harjanto Halim
- Budi Hartono
- Sapto Utomo Hidayat
- Taufiq Dipayana, S.H., M.Kn., M.M

2. Dewan Pengurus Harian

- Ketua :

Dedy Mulyadi Ali, S.E., M.I.Kom

- Wakil Ketua I (Bidang Organisasi) :

Ir. Nur Widhi Wijatmoko

- Wakil Ketua II (Hukum, Pembelaan, Pengupahan, dan HIP)

Daryanto, S.H

- Wakil Ketua III (Diklat dan Lingkungan)

Ir. H. Sukanto Djatmiko, M,Si.

- Wakil Ketua IV (K3 dan Produktivitas)

Bagus Andriyanto, S.E., M.M

- Wakil Ketua V (Nakerwan, Penca dan Kependudukan)

Dra. Hj. Siti Fatimah, S.I.P

- Sekretaris

Drs. Lilik Sunaryo, M.Pd

- Wakil Sekretaris

R. Noegoro Aprianto, S.H

- Bendahara

M. Suyanto Prawira, B.A

3. Bidang Bidang

- Bidang Organisasi

R.A. Noegroho Septianto, S.H

- Bidang Hukum dan Pembelaan

Epy Apriadi, S.H

- Bidang Pengupahan dan HIP

Susasi Widyati, S,S.H

- Bidang Dana, Usaha dan Koperasi :

Novianto Adi Nugroho, S.S

- Bidang Diklat dan Litbang

Budi Cahyono, S.H

- Bidang Nakerwan, Anak, dan Penca

Dian Mayasari, S.Psi.

- Bidang Hubungan Masyarakat

Suharyanto, S.E.

4. Kesekretariatan

- Sekretaris Eksekutif :

R. Noegroho Aprianto, S.H

- Keuangan :

Umi Lastri

- TI :

Ibrahim Ajie

- Tim Bantuan Hukum :

Kantor Hukum “Wira Aryastya”